31. Dampak Asap dan Penanggulangannya

by Azhar31 Azhar

Submission date: 21-Nov-2019 07:37PM (UTC+0700)
Submission ID: 1218619717
File name: nggulangannya_di_Indonesia_Dalam_Perspektif_Sosiologi_Hukum.docx (52.95K)
Word count: 5308
Character count: 34135

Dampak Asap dan Penanggulangannya di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Azhar

PPA, FBEPS, UBD

FH. UNSRI.

E-mail: aazhar_2000@yahoo.com

1. Pendahuluan

Kita dengar ada pepatah yang mengatakan bahwa "tiada asap tanpa api," atau sebaliknya "tiada api tanpa asap." Hal lni berlaku juga dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sepeni di Propinsi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi. Daerah-daerah tersebut setiap tahun merupakan daerah sumber terjadinya asap yang notabene berasal dan api.

Api terjadi karena interaksl dari tiga unsur, yaitu panas, bahan bakar dan oksigen. Api inilah yang menghasilkan asap. munculnya api disebabkan oleh dua hal. yaitu alam dan manusia. Terjadinya api secara alamiah disebabkan oleh gesekan antara rumput dan tumbuh-tumbuhan yang kering sehingga menimbulkan panas. Dengan demikian, tumbuhan itu sendiri yang menjadi bahan bakarnya. Hal lain yang menyebakan api lalah manusia. Kemunculannya bisa terjadi secara tidak disengaja atau disengaja. Secara tidak disengaja api bisa terjadi akibat adanya orang yang buang puntung rokok tanpa disadari di lahan yang berumput kering atau ada yang menjadikan api untuk memasak atau api unggun tanpa dimatikan secara sempurna. Sebaliknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan disengaja antara lain bertujuan untuk membersihkan lahan persawahan dengan mudah dan cepat dengan membakar rerumputan di atas lahan tersebut atau yang lebih parah lagi membakar hutan atau semak belukar untuk pembukaan lokasi perkebuanan kelapa sawit. Keadaan yang terakhir inilah yang banyak terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan. khususnya diwilayah Propinsi Sumatera Selatan. Jambi, Riau, Kalimanatan Barat, Timur dan Tengah Selanjutnya kita akan membahas dampak dan asap tersebut.

1. Dampak asap

Dampak asap ini telah melanda berbagai kota di Indonesia bahkan sampai ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Kabut asap tebal di Kota Padang, Sumatera Barat sejak awal September 2006 mulai mangganggu aktivltas masyarakat. Terutama Nelayan. Sepanjang hari, dari pagi hingga malam, ketebalan kabut tidak kunjung menipis walaupun diterpa hujan satu-dua jam.

Kebanyakan nelayan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Mengeluhkan dampak asap tersebut. Kapal nelayan yang biasanya merapat di kawasan tempat pelelangan ikan Pasia Nan Tigo pukul 6.30, pada saat adanya kabut asap baru bisa merapat pukul 9.30 sampai pukul 12.00 WIB. "Karena kabut asap tebal. kapal kehilangan arah untuk mencari tempat menangkap yang potensial. bahkan arah pulang pun tak tahu. Akibatnya waktu habis untuk berputar-putar cari arah," sehingga menyebabkan kerugian waktu, bahan bakar minyak, dan tenaga (Kompas, 8 September 2006).

Menurut para nelayan, kabut asap tebal membuat jarak pandang amat terbatas, berkisar 30-50 meter. Karena sulit menentukan kawasan tangkap. kapal menebar pukat di sembarang tempat saja, sehingga hasil tangkapan menjadi

kurang memuaskan. “Di musim kabut asap tebal akhir-akhir ini waktu berlayar menjadi lama dan hasii tangkapan sedikit. Mau tak mau, harga hasil tangkapan naik." hal ini dikeluhkan oleh para nelayan.

Nelayan di kawasan Puruih. Kecamatan Padang Utara. juga mengeluhkan kabut acap tebal yang mengganggu aktivitas menanggap ikan. "Hasil tangkapan menurun dibanding hari-hari tanpa kabut asap. Karena itu jangan heran harga Ikan cenderung naik."Harga cumi-cumi yang semula Rp25.000/kg. sekarang harganya Rp35.000/kg. Ikan tongkol yang sebelumnya di pasar Rp20.000/kg. kini menjadi Rp40.000/kg (Kompas. 8 September 2006).

Sebaliknya dalam pengamatan awal pekan bulan September, 2006. dari penerbangan komersial, masih terlihat pembakaran lahan di wilayah Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat Petugas pengamat asap dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalbar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir citra satelit tidak lagi mendeteksi titik api di Kalbar pada awal bulan September 2006. (Kompas, 8 September 2006).

Di kota lain kandungan partikel berukuran kurang dari 10 mikron dalam udara kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melampaui baku mutu atau batas yang diperkenankan. Indeks standar pencemaran udara untuk partikel yang berukuran kurang dari 1O mikron (PM 10) Kamis (5/10/06). tercatat di angka 679 Padahal batas nilai ISPU di angka 300 ke atas sudah masuk kategori berbahaya. Secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (Kompas, 5 Oktober 2006).

"Parfikel PM 10 tadi terutama berasal dari debu yang terkandung dalam asap kebakaran lahan. Hari-hari belakangan ini, jumlah partikel PM 10 tadi sudah membahayakan." kata Kepala Unit Pelaksana Teknis. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Palangkaraya. Sebagai gambaran, ISPU parameter PM 10 dari tanggal 1-5 Oktober 2006 berturu-turut adalah 649, 821, 1.007. 477 dan 679. Kandungan Karbon Monoksida (CO) di Palangkaraya akibat kabut asap juga sudah dalam taraf tidak sehat. yaitu dengan nilai ISPPU di atas 101 (Kompas, 5 Oktober 2006).

Kandungan CO ini mengakibatkan pusing-pusing bagi banyak warga Palangkaraya terlebih bila tidak memakai masker. Diperkirakan jarak pandang hanya 500 meter. Padahal dalam kondisi normal, jarak pandang mencapai 10.000 meter. Kondisi ini tentu sangat barbahaya bagi keselamatan penerbangan.

Akibatnya banyak maskapai penerbangan yang mestiya tinggal landas menjelang pagi, terpaksa menunda keberangkatannya. Mereka menunggu sampai jarak pandang benar-benar aman. Termasuk penerbangan pesawat Garuda ke Jakarta. Memang tak sampai batal terbang. Namun, penundaan hingga satu jam lebih itu tak urung membuat penumpang kesal.

Walau terlambat. Penumpang sebetulnya sedikit beruntung. Nasib buruk dialami ratusan calon penumpang di Bandara Sultan Thah Syarifudin, Jambi. sumatera Selatan. Mereka urung mengudara setelah bandara dinyatakan tertutup bagi semua penerbangan, akhir bulan september, 2006. Semua penerbangan dari Jambi ke Jakarta dan sebaliknya, masing-masing enam kali sehari, terpaksa batal berangkat dan mendarat. Yakni dua penerbangan Lion Air dan masing-masing satu penerbangan Garuda, Adam Air, Batavia Air dan Sriwijaya Air.

Kabut asap di Jambi lauh lebih pekat. Pagi hari. jarak pandang hanya 100 meter 200 meter. Siang hari sempat membaik hingga 400 meter. Namun, menjelang sore menebal hingga jarak pandang 200 meter. Tentu kualitas udaranya pun buruk. Indeks pencemaran udara menunjuk angka 151. Angka yang masuk pada skala tidak sehat, yakni 100 hingga 200.

Ketebalan asap juga mengganggu penerbangan diatas Kalimantan. Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup, termasuk yang jadi korban. Perjalanan Rachmat dari Jakarta menuju Plangkaraya terasa makin jauh karena seluruh penerbangan menuju ibu kota Kalimantan tengah itu dibatalkan pada awal bulan Oktober, 2006.

Bagi perusahaan penerbangan. gangguan asap memang belum merugikan secara ekonomi. "Karena tidak sampai menurunkan jumlah

penumpang," ujar Kepala Humas Garuda. Hal ini merugikan justru pemakai jasa angkutan udara, karena keberangkatannya tertunda dan kenyamanannya terusik.

Ketidaknyamanan ini tidak hanya dirasakan penumpang di bandara-bandara yang tertutup asap. melainkan juga oleh penumpang di bandara lain. Sebab pesawat yang mengalaml penundaan juga melayani rute lain yang udaranya bersih. "semacam efek domino." kata Kepala Humas Garuda.

Gangguan asap tebal sudah menjadi langganan tahunan bagi Indonesia. Terutama ketika musim kemarau tiba. Penyebabnya
Adalah kebakaran hutan yang melanda Sumatera dan Kalimantan, baik yang tak sengaja maupun disengaja. Gangguan kali ini merupakan yang terparah sejak tahun 1997.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup, LSM yang bergerak di bidang llingkungan hidup, hingga Agustus saja sedikitnya hampi 19.000 titik api terdeteksi di Sumatera dan Kalimantan. Adapun wilayah terparah adalah Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Hingga kini, pemerintah belum mendapat angka pasti tentang luas areal hutan yang terbakar. "Yang jelas, Kalimantan Barat paling parah karena areal hutannya memang luas," kata Rachmat Witoelar. Tentu, kerugian yang terjadi tak sekadar angka-angka luas hutan yang terbakar, melainkan juga kenyamanan warga (Gatra, 12 Oktober 2006).

Keadaan Kota Banda Aceh dan sebagian wilayah di Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai diselimuti kabut asap tipis, Rabu pagi (18/10/06), akibat pembakaran hutan di propinsi lainnya (Gatra, 18 Oktober 2006).

Pembakaran lahan dan semak-semak kering di Bangka Tengah dan Bangka Selatan terus berlanjut sehingga mengakibatkan Pulau Bangka diselimuti kabut asap pekat. Pada pagi hari, jarak pandang di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sempat turun sampai kurang dari 1.000 meter, tetapi tidak sampai menganggu penerbangan.

Kabut asap sangat pekat menyelimuti jalan antara Pangkal Pinang sampai ke Tboali di pagi hari. Semua kendaraan harus menyalakan lampu agar terlihat oleh pengendara dari arah berlawanan (Kompas, 19 Oktober 2006).

Kabut asap yang melanda beberapa kabupaten/kota di Pulau Bangka ini bukan kiriman dari Pulau Sumatera karena datang dari arah selatan Kota Pangkal Pinang. Asap akibat pembakaran lahan itu sudah terlihat sejak sore hari karena banyaknya orang yang membersihkan ladang dan kebun mereka dari ilalang. Asap dari pembakaran berbagai lading itu sering menutupi jalanan sehingga jarak pandang turun sampai 50 meter. Kondisi itu memaksa para pengemudi memperlambat laju kendaraan untuk menghindari kecelakaan.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Pangkal Pinang, kabut asap yang paling parah terjadi pada pukul 06.00 sampai 09.00. Pada pukul 08.00, jarak pandang di Bandara Depati Amir sempat turun sampai kurang dari satu kilometer sehingga mengganggu penerbangan.

Namun, tiupan angin yang kencang membuat kabut asap cepat beralih sehingga jarak pandang bagi penerbangan kembali di atas 1.000 meter. Kondisi itu menyebabkan tidak ada pesawat yang gagal mendarat karena terhalang kabut asap, seoerti yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air, Tabu (18/10/06) yang lalu.

Pembakaran lahan semakin intentif dilakukan para petani di Bangka Tengah dan Bangka Selatan untuk mempersiapkan lahan mereka bagi pertanian di musim hujan. Menurut petani di Pangkalan Baru, Bangka Tengah, kebiasaan membakar lahan sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah tetapi tetap dilakukan oleh petani karena merupakan cara yang paling efektif. Tingginya upah dan sedikitnya pekerja di sektor pertanian, membuat para petani memilih membakar lahan untuk pembersihan. Pembakaran harus segera dilakukan sebelum datangnya musim hujan, yang akan membuat pembersihan dengan cara itu sulit dilakukan.

Serbuan kabut asap akibat kebakaran lahan dan semak belukar yang terus terjadi

menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudinnoor, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis, mengalami penundaan lebih dari tiga jam. Hal ini terjadi karena jarak pandang di landasan pacu pada pukul 06.00 hingga pukul 09.00 pagi hanya 100 hingga 300 meter (Kompas, 2 Nopember 2006).

Kepala Divisi Operasional PT Angkasa Pura Bandara Syamsudinnoor, mengatakan, kegiatan penerbangan mengalami penundaan karena cuaca buruk karena serbuan asap. Akibatnya, ada empat penerbangan pagi mengalami penundaan keberangkatan. Tiga pesawat diantaranya tujuan Jakarta masing-masing, Batavia, Lion Air dan Garuda. Sedangkan tujuan Surabaya adalah pesawat Trigana Air. "Pesawat-pesawat itu secara berturut-turut baru bisa terbang setelah pukul 09.30. Kegiatan di bandara juga berlangsung normal karena jarak pandangan sudah di atas 300 meter," katanya. Serbuan asap yang paling parah terjadi pada Rabu tanggal 1 Nopember, 2006 siang karena membuat kegiatan penerbangan di bandara ini sempat terhenti total hampir Sembilan jam. Selain melumpukan aktivitas penerbangan komersial, serbuan asap tersebut membuat kegiatan pesawat Hercules yang akan membikin hujan buatan juga sampai sekarang belum bisa dilakukan. "sampai saat ini kegiatan hujan buatan dengan pesawat itu belum bisa dilakukan akibat serbuan asap ini," katanya.

Dampak asap tidak hanya menimbulkan gangguan di dalam negeri tetapi juga negara tetangga seperti Brunei Darussalam. Malaysia dan Singapura. Beberapa tanggapan/ para pemimpin negara tetangga tersebut terhadap asap yang mengganggu negara mereka.

Menteri Pembangunan Brunei Darussalam Pehin Dato H. Abdullah mengakui Indonesia kesulitan mengatasi masalahkabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karena luasnya negara tersebut. (Gatra, 14 Oktober 2006).

"Kami memahami Indonesia merupakan negara yang besar dan luas hingga sulit meredam kebakaran yang menyebabkan kerebu(asap)," kata Abdullah, sebagaimana dikutip dari Antara, di Pekanaru, Jum'at 13 Oktober 2006.

Menurut dia, pihaknya memahami betul permasalahan dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan kabut asap hingga ke negerinya.

"Kami tidak complain adanya jerubu dari Indonesia karena itu dibawa angin. Kami coba mengerti problem Indonesia sana-sini cukup banyak ditambah pula luasnya peladangan (perkebunan) juga aktivitas masyarakatnya yang ramai," ungkap Abdullah (Gatra, 14 Oktober 2006).

Ia mengatakan, kebakaran yang terjadi ada kalanya tidak disengaja atau karena faktor alam dari musim kering dan panas yang tinggi hingga terjadi kebakaran.

Tetapi, lanjut dia, untuk mencegahnya saat memasuki musim kering perlu diambil tindakan awal menyadarkan berbagai pihak agar tidak melakukan pembakaran. "Negara kami kecil beda dengan Indonesia. Karena berada di Pulau Borneo kami juga kena imbas jerebu/asap dari Palangkaraya atau Pontianak, tapi kami sadar Indonesia telah berusaha keras mengatasinya," ujar Abdullah.

Lain halnya dengan negara jiran kita Malaysia melalui Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Zainal Abidin Zain menyatakan, negaranya memberi peringatan (warning) kepada pemerintah Indonesia agar tidak "mengekspor" asap ke Malaysia tahun depan (Gatra, 12 Oktober 2006).

Zainal Abidin menambahkan asap dari Indonesia yang bersumber dari pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera sangat membahayakan kesehatan manusia karena dapat mengakibatkan penyakit saluran pernafasan (ISPA). Kabut asap akibat terbakarnya hutan di dua provinsi di Indonesia ini telah membuat warga Malaysia menjadi kesal dan meminta agar kasus asap seperti ini tidak akan terjadi pada 2007.

Selanjutnya Pemerintah Malaysia meminta pemerintah Indonesia serius menangani masalah asap tersebut yang tidak hanya dalam negeri tetapi juga merambah negeri jiran. Malaysia dan Singapura terganggu aktivitas warganya. Polusi asap ini sudah berlangsung sejak tahun 1997,

namun, solusi untuk mengatasinya asap akibat kebakaran hutan sampai saat ini belum tuntas dilakukan pemerintah Indonesia. Akibatnya saat ini sebagian warga Malaysia terpaksa menggunakan masker saat keluar rumah, bahkan mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke negeri Jiran itu. Pemerintah Malaysia berharap terjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani kabut asap tersebut.

Sehari sebelumnya, yakni pada pertemuan dengan sejumlah pelajar dan mahasiswa asal Malaysia, Dubes Malaysia Dato' Zainal Abidin meminta kepada Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) untuk memperkarakan secara hukum kalau memang ada perusahaan Malaysia yang diduga terlibat pembakaran hutan secara liar di Kepulauan Riau.

Namun, pihaknya akan menuntut balik apabila empat group perusaahan Malaysia yang dituding membakar hutan tapi tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang dituduhkannya.

Sebaliknya menanggapi surat dari Perdana Menteri Singapura terhadap export asap dari Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2006 menghubungi Perdana Menteri Singapura Lee Hsien long, guna meminta maaf secara langsung atas persoalan asap pembakaran hutan di indonesia yang sampai ke wilayah singapura (Gatra, 12 Oktober 2006).

Presiden meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat Singapuran dan Malaysia akibat asap ini. Dalam pembicaraan melalui telpon itu, Presiden Yudhoyona mengusulkan adanya kerjasama bersama negara-negara Asean untuk mencari solusi menyeluruh jangka panjang untuk mengatasi masalah asap yang terus terjadi setiap tahun ini (Gatra, 12 Oktober 2006).

Selain itu, presiden Yudhoyono juga menyepakati untuk segera melakukan retifikasi kesepakatan dengan negara-negara Asean mengenai persoalan penanganan asap ini. "Presiden megatakan akan meratifikasi agreement ini, sekaligus menjalankan penanganan komprehensif masalah asap ini."

Sebelumnya, PM Lee telah menyurati presiden Yudhoyono, yang isinya soal kekecewaan negaranya terhadap kiriman asap yang setiap tahun diterima singapura dari pembakaran hutan yang terjadi di wilayah indonesia.

Dalam pembicaraan itu, juga dibahas mengenai rencana pertemuan mentri-mentri lingkungan hidup Asean pada jumat (12/01/06) di pekanbaru, Riau.

Pertemuan itu akan membahas kerjasama secara umum antar negara Asean dalam menangani persoalan asap ini, seperti yang sebelumnya telah disepakati dalam kesepakatan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas atau ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution.* Mengenai ratifikasi kesepakatan itu, juru bicara Kementrian Luar Negri Indonesia mengatakan masih perlu waktu untuk membahasnya karena menyangkut persoalan hukum. "saya tidak tahu kapan waktunya," ungkapnya (Gatra, 12 Oktober, 2006).

Sebelumnya, Mentri Negara Lngkungan Hidu Rachmat Witoelar menyatakan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 memang menandatangani Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Namun, hingga kini DPR belum meratifikasinya dalam ketentuan di indonesia.

Akhir-akhir ini, sejumalah pihak di Malaysia mengungkapkan kekesalan mereka atas dampak asap Indonesia yang tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga mengganggu perekonomian warga negara jiran itu. Jadi, dampak dari kabut asap sudah merugikan kesehatan, lingkugan, perekonomian, hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Pada 13 Oktober 2006, di Pekanbaru, telah berlangsung pertemuan para mentri lingkungan hidup Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas upaya-upaya pemadaman api. Dalam pertemuan tersebut tidak hanya mentri lingkungan hidup tetapi juga mentri-mentri terkait untuk membahas teknologi pemadaman api. Sayangnya hingga kini negara Indonesia belum menerima *agreement* yang dibuat di pekan baru riau tersebut.

Walau demikian ternyata *"bagaikan menggunting dalam lipatan"*atau *"musuh dalam selimut"* pemerintah Singapura membawa masalah ini ke sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini membuat pemerintah Indonesia marah atas peernyataan pemerintah Singapura di Majelis Umum PBB. Pernyataan yang berisi bahwa Indonesia tetap membutuhkan bantuan internasional untuk menangani asap tersebut dirasakan pemerintah sebagai intervensi kebijakan dalam negri.

Kekecewaan pemerintah terhadap Singapura itu berwal ketika Sidang Umum Majelis PBB diadakan 20 Oktober 2006 lalu. Saat itu ada pembahasan agenda kerjasama PBB-ASEAN. "Sebenarnya, penanganan asap tidak ada dalam agenda namun delegasi Singapura memaksakan membahasa masalah asap dalam forum itu (Sripo, 6 Nopember 2006)."

Pemerintah tersebut terkesan sangat dipaksakan. Delegasi Indonesia tidak terima karena masalah asap sudah memiliki kesepakatan kerjasama bilateral antara RI dengan negara-negara ASEAN, khususnya antara negara Malaysia,Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Pemerintah Indonesia tidak mau masalah tersebut dibawa ke majelis umum karena tidak berkaitan dengan PBB. Di sidang komite III Majelis Umum PBB, Indonesia langsung mengeluarkan dua kritik pedas untuk pemerintah Singapura.

Kritik itu menyatakan bahwa Singapura juga banyak merugikan Indonesia. Mereka ikut andil dalam kebakaran hutan serta ladang yang akhirnya menimbulkan asap berkepanjanga. Sebab, ada warga negara Singapura yang melakukan pembakaran liar di utan Indonesia. Namun, pemerintah Singapura terkesan melindungi mereka. Selain itu, masih ada kesalahan Singapura seperti pelimpahan limbah B3(bahan beracun dan berbahaya), penambangan pasir pantai, serta bocoran minyak dari kapal tanker Singapura yang melintas di selat Malaka. Singapura seharusnya memperhatikan hubungan bilateral antara RI dan pemeritahnya. Mereka sudah menyepakati hasil keputusan forum RI-ASEAN tentang asap yang diselengarakan di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Namun, yang terjadi, mereka malah mengeluarkan pernyataan negatif tersebut.

Akibat pernyataan yang dibuat Singapura di Komite III Majelis Umum PBB itu, kantor Kementrian Luar Negri RI memanggil Dubes Singapura pada jumat (27/10/06). Isu asap yang diembuskan Singapura di PBB telah mrusak spirit kerja sama ASEAN yang sudah kita sepakati di Pekanbaru. Apalagi, presiden SBY telah bersungguh-sungguh meminta maaf kepada pemerintah Singapura dan Malaysia. (Sriwijaya pos, 6 Nopember 2006).

Dari uraian tersebut asap mempunyai dampak yang sangat banyak dan luas, antara lain :

1. Terhadap kesehatan manusia tidak hanya di lokasi asap tetapi juga ditempat lainya seperti di negara-negara.
2. Terhadap lalu lintas manusia dan barang karena terganggunya alat transportasi baik itu pesawat terbang, kendaraan darat, laut dan sungai;
3. Terhadap perekomian masyarakat ;
4. Terhadap kelestarian hutan dan bio diversiti yang ada ; dan
5. Terhadap hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

3. Penanggulangan Asap

Penanggulangan asap secara hukum dan administrasi sudah mulai dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah seperti sudah dilakukan oleh kementrian lingkungan. Bahkan, Mentri Koordinator Kesejahteraanyang mengkoordinasikan kementrian lingkungan mengatakan sudah ada tujuh perusahaan besar yang diperiksa karena diduga melakukan pembakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan. Namun belum bersedia menyebut nama-namanya. *"Masih dalam tahap pengumpulan bukti,"*katanya. Dia berjanji akan memproses ketujuh perusahaan itu secepat mungkin (Kompas, 26 Agustus 2006). Jika terbukti, para pelaku pembakaran hutan ini akan dijerat dengan undang-undang kingkunga hidup dan undang-undang perkebunan.

Dilain pihak, Mentri Negara Lingkungan Hidup, mengatakan masih sulit membuktikan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar itu.

Masalahnya, yang tertangkap basah melakukan pembakaran adalah rakyat kecil. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang dibayar untuk membakar lahan.

Kendati belum ada 'bukti,' pemerintah telah menyandera lahan-lahan milik perusahaan yang dicurigai memasang *police line*. Selanjutnya kemungkinan jumlah perusahaan besar yang akan di usut semakin banyak. "Angka tujuh [perusahaan] itu baru data dari KLH. Dari Mabes Polri masih ada lagi. Jadi masih mungkin bertambah."

Sikap tegas juga disampaikan wakil presiden, saat berada di Riau untuk menerima laporan dari kepala polisi daerah Riau tentang adanya 20 orang pembakar hutan yang ditangkap (Kompas, 25 Agustus 2006).

Bom-bom air,mulai dijatuhkan beberapa hari dengan dua unit pesawat Herculles. Lima propinsi yang menjadi target adalah Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.ical mengaku pemadaman api dengan cara itu tak seratus persen dapat memadamkan api. "Tapi paling tidak usaha ini bisa mengurangi penyebaran kebakaran hutan." Adapun dana untuk membiayai hujan buatan dan bom-bom air itu mencapai sekitar 2 miliar. (HAL 78)

Menteri negara riset dan teknologi, mengatakan pihaknya sudah siap memadamkan api dengan hujan buatan. "Karena tahun lalu pun sudah kita lakukan." Tapi untuk bom-bom air, dia mengaku masih ada kesulitan menemukan tangki air-tangki air berukuran kecil.

Selain hujan buatan dan bom air yang merupakan upaya jangka pendek, pemerintah juga tengah menyiapkan program jangka panjang. Salah satunya dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pembakaran hutan. "Bagi perkebunan besar yang sudah melanggar berkali-kali—meski sudah diingatkan—akan kita tindak."

Sedangkan untuk menghadapi masyarakat yang biasa membuka lahan dengan membakar hutan, pemerintah akan mengintensifkan pe-tokoh masyarakat setempat, sosialisasi akan dilakukan dengan membagikan poster dan komik tentang bahaya membakar hutan. Upaya ini akan dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH).

Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi masyarakat yang membuka lahan tanpa membakarnya. Insentif itu berupa pemberian bibit dan pupuk gratis. Sistem peringatan dini kebakaran hutan, juga akan dibangung bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah menargetkan memadamkan kebakaran hutan di lima propinsi pada 2 September 2006. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan titip api saat ini sudah jauh berkurang. "[Jumlah titik api] sudah berkurang, tapi kita akan minta Bakornas tetap melakukan pemadaman." (Kompas, 28 Agustus 2006).

Sementara itu, menteri riset dan teknologi (Menristek) mengatakan pemerintah sudah mengirimkan satu pesawat Hercules ke Bandara Tabing, Sumatra Barat. Di sana, pesawat ini akan mengangkut 30 ton garam untuk memicu hujan di Kawasan Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan untuk memadamkan api di lokasi yang sulit didekati dari darat.

Di Rakor Kesra, tanggal 28 Agustus 2008, dilaporkan bahwa jumlah titik api di beberapa propinsi mulai berkurang karena 'bantuan' hujan maupun pemadaman yang dilakukan secara sengaja. Di Jambi, misalnya, hujan deras sangat berperan mengurangi jumlah titik api.

Menurut Gubernur Jambi, dari 346 titik api di Jambi, yang tersisa kemarin tinggal 16. Gubernur Riau, Rusli Zainal, juga mengungkapkan titik api di daerahnya tinggal 16 dari semula 42 titik.

Sementara itu, di Sumatra Selatan, meski belum diguyur hujan, namun dari 160 titik api, saat ini yang tersisa tinggal 40 titik api karena pemadaman. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran mengatakan saat ini tersisa delapan titik api di Kalteng.

Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyebutkan 31 perusahaan yang diduga membakar hutan. "*Namun masih harus diverifikasi karena ada yang tidak akurat*," katanya.

Gubernur Riau, mengatakan dari 86 kasus yang diproses karena melakukan pembakaran hutan, 58 ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah itu, dua sudah divonis.

Gubernur Jambi meminta agar Malaysia dan Singapura yang terkena dampat asap dari kebakaran hutan di Indonesia agar tidak hanya melontarkan protes. "Mereka juga harus membantu karena kita bukan hanya mengekspor asap, namun juga mengekspor oksigen," (Republika, 29 Agustus 2006).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinannya karena Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatera mengirimkan asap ke luar negeri akibat pembakaran hutan dan lahan. Sama seperti di dalam negeri, asap itu mengganggu lingkungan, kesehatan, dan penerbangan.

Presiden dalam pencanangan rehabilitasi dan revitalisasi bekas pengembangan lahan gambut di Desa Dadahup, Kapuas Murung, Kapuas, Kalimantan Tengah mengemukakan bahwa "Sungguh memprihantinkan (pembakaran hutan dan lahan) karena kadang-kadang asap itu juga menyebar ke negara tetangga. Kita tidak boleh membiarkan semua ini terus terjadi, (Kompas, 31 Agustus 2006)."

Secara khusus sebagai satu penyumbang ekspor asap ke luar negeri itu, Presiden menekankan perlunya penanganan dan pengelolaan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Pembakaran itu selain merusak hutan, mengganggu kesehatan, juga mengganggu penerbangan. Presiden telah mencanangkan untuk;

1. segera menghentikan ekspor asap;
2. perlu upaya sungguh-sungguh untuk menangani ini oleh semua pihak;
3. cegah kebakaran hutan;
4. cegah terjadinya asap yang tidak sewajarnya;
5. polisi harus tegas menegakkan hukum.

Kepada apparat kepolisian, presiden telah menyebut banyaknya perusahaan perkebunan di Sumatera yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran untuk itu "Tegakkan hukum demi kepentingan rakyat kita dan daerah yang bersangkutan."

Di lain pihak Menteri Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa efek kekeringan akan terjadi dalam waktu yang lama sehingga memicu terus berlangsungnya kebakaran lahan. "Dalam jangka pendek, pemerintah memandang perlunya segera dilakukan berbagai upaya pemadaman api," katanya, di Palembang, seusai memantau titik api di Sumatera Selatan (Kompas, 14 Oktober 2006).

Pemadaman itu diantaranya melibatkan masyarakat, Manggala, penyediaan peralatan pemadaman, dan parit-parit di lahan gambut. Dalam jangka panjang, pemerintah harus segera mencari alternatif pencegahan dan penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Raden Intan Lampung mengatakan, berdasarkan analisa, jika badai El Nino muncul, maka kekeringan akan bertambah parah.

Pantauan dari udara, pembakaran lahan masih marak berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sehingga menimbulkan kabut asap yang tebal di wilayah itu. Lokasi kebakaran di antaranya, di sekitar Sungai Menang, dan Teluk Selapan (Kompas, 14 Oktober 2006).

Kebakaran di Sumatera Selatan, merupakan kebakaran terparah setelah Kalimantan. Total luas lahan di Sumatera Selatan yang terbakar sekitar 55.815 hektar. Terdiri atas lahan perkebunan besar seluas 1.306 hektar, lahan hutan 19.000 hektar, dan masyarakat 35.509 hektar. Kerugian

akibar kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp 130 miliar. (HLN)

Indonesia telah menyewa pesawat dari Rusia untuk memadamkan api di daerah-daerah yang tingkat asapnya sangat tinggi, dua pesawat terbang yang masing-masing pesawat mampu membawa 40 ton air (Gatra, 16 Oktober 2006).

4. Penanggulangan Asap dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Asap yang terjadi hampir tiap tahun menimbulkan dampak yang luas terjadi di berbagai tempat di Indonesia diakibatkan oleh pembakaran hutan atau semak belukar. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang dari dulu dilakukan terus menerus dan diperparah oleh pembakaran hutan dalam rangka pembersihan tanah untuk lahan perkebunan.

Penanggulangan asap yang dilakukan Pemerintah Indonesia "sudah sangat memadai," kalau kita lihat dari berbagai pernyataan dari presiden, menteri coordinator, menteri terkait, para gubernur, bupati, dan pejabat terkait lainnya. Tetapi kenapa asap tersebut bukan mereda atau hilang? Bahkan tiap tahun makin menjadi-jadi khususnya dikala musim kering. Untuk itu mari kita lihat dalam perspektif Sosiologi Hukum, kenapa hal tersebut bisa demikian dan bagaimana sebaiknya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah asap ini.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum paling tidak ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan asap tersebut antara lain faktor hukum atau peraturan, apparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi.

Faktor hukum atau peraturan ini dapat kita lihat bahwa hukum atau peraturan mana yang dilanggar apabila seseorang apabila tanpa sengaja dia membuang puntung rokok yang dapat menyebabkan kebakaran dapat dihukum. Demikian pula terhadap orang yang membakar semak belukar untuk tempat persawahan dan juga yang melakukan pembersihan tanah dengan cara membakar lokasi untuk perkebunan. Hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, yang ada dengan menggunakan kitab Undang-Undang Hukum pidana yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, yang tidak mengatur secara khusus perihal pembakaran hutan atau lahan. Sehingga peraturan yang diterapkan terhadap pembakar hutan yang hanya dapat menjerat pelaku dilapangan bukan orang yang bertanggung jawab dibalik itu. Terkesan pemerintah memaksakan memberlakukan undang-undang yang sudah tidak dapat menjangkau kemajuan zaman.

Untuk itu diperlukan suatu undang-udang yang mengatur tentang sanksi pembakaran lahan baik untuk pertanian maupun untuk perkebunan yang mengandung sanksi/hukuman tidak hanya bagi yang melakukan pembakaran dilapangan tetapi juga peraturan/undang-undang yang dapat menjerat bagi menyuruh melakukan pembakaran.

Berikutnya faktor sarana dan prasarana, yaitu menyangkut dua hal yaitu pencegahan dan pengendalian asap. Pencegahan meliputi, monitoring kawasan atau lokasi yang biasanya terjadi kebakaran hutan. Mengingat luasnya areal yang akan diawasi, maka tidak mungkin dilakukan dengan peralatan konvensional. Harus menggunakan satelit dan menggunakan alat transportasi yang bisa menjangkau wilayah yang luas.

Pengendalian sumber asap dalam hal kebakaran hutan atau lahan gambut dengan menggunakan alat kebakaran yang modern dan menjangkau luas kawasan yang akan dikendalikan adalah suatu keharusan. Tidak mungkin menggunakan alat pemadan kebakaran seperti yang digunakan untuk memadamkan kebakaran didalam kota. Dalam hal ini diperlukan pesawat yang dapat digunakan untuk memadamkan api yang luas. Sayangnya pemerintah Indonesia menyewa pesawat alat angkut dari rusia setelah

terjadi kebakaran hutan yang telah meluas. Sebaiknya sebelum terjadi kebakaran hutan sudak disiapkan yang dapat mencegah kebakaran hutan yang lebih luas.

Mengenai faktor aparat penegak hukum, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Apakah aparat m]penegak hukum seperti polisi, petigas dari dinas kehutanan dan pemerintah daerah memahami dan mengerti bertapa bahanya dampak pembakaran hutan yang bisa merugikan secara kesehatan, lingkungan, ekonomi dan hubungan diplomatic?
2. Apakah aparat tersebut di atas di rekrut secara benar dan di tingkatkan keahlian dan kemampuannya? Dalam artian mereka tidak mendapatkan posisinya karena menyogok? Di samping oerlunya peningkatan keahlian, ketrampilan dan wawasan berpikir terhadap dedikasi dan motivasi aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah mereka menjadi aparar karena darihati nuraninya atau hanya karena lingkungan yang mendorong mereka atau karena hanya faktor ekonomi, dan gengsi semata-mata?
3. Selanjutnya apakah aparat tersebut sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dengan tenang dan dedikasi tinggi melaksanakan tugasnya? Kalau aparat tersebut diberi gaji satu bulan dan gaju tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dua minggu, jangan harap para aparat akan berdedikasi tinggi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena, pikiran dan konsentrasi mereka bercabang. Di satu pihak dituntut untuk berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan di lain pihak dituntut harus memenuhi kebutuhan pokok baik dirinya maupun keluarganya. Hal inilah yang membuka paluang terjadinya penyalahgunaan kedudukan/ jabatan, kolusi dan korupsi. Bukan rahasia umum bahwa banyak perusahaan perkebunan yang memperkerjakan sacarah paruh waktu aparat baik, untuk alasan keamanan maupun untuk kelancaran dalam pengurusan birokrasi di Indonesia. Disamping itu banyak perusahaan perkebunan yang menjadi sumber penghasilan bagi para aparat terkait.

Kemudian, faktor lainnya yaitu budaya hukum masyarakat. Khusus untuk masalah asap bahwa dari dahulu, tiap tahun adanya asap disaat-saat musim panas atau kering. Berdasarkan kebiasaan masyarakat di daerah-daerah, mereka melakukan pembakaran semak belukan dalam rangka mempersiapkan untuk melakukan tanah guna ditanami. Mereka beranggapan bahwa semak belukar yang dibakar bisa menjadi subur. Hal ini dilakukan dari dahulu hingga sekarang. Sehingga masyarakat merasa hal itu suatu kewajaran dan tanpa menyadari dampak yang diakibatkan. Untuk Itu dipedukan keq'a keras para ahli bidang lingkungan, kedokteran untuk menyadarkan. sosialisasi dan membed tahu masyarakat bahwa pembakaran hutan itu tidak benar dan merusak lingkungan. Produk pembakaran api berupa asap menimbulkan penyakit seperti infeksi saluran pemapasan atau salesma. Media Massa pun harus ambil pagian dalam menyebarkan dan menyadarkan serta mempropaganda bahaya pembakaran hutan dan asap. Para tokoh masayarakat. alim ulama dan pejabat pemerintah harus aktif mengobarkan perang terhadap pembakaran hutan dan asap. Lembaga Swadaya masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dan mendorong masayarakat untuk menghentikan pembakaran. Di sekolah-sekolah dan universitas harus disosialisasikan kepada para murid dan mahasiswa dan dosen bahaya akan pembakaran hutan dan asap. Dengan demikian diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat luas betapa bahayanya pembakaran lahan. hutan dan asap.

Terakhir adalah faktor ekonomi. Faktor ini merupakan sangat penting. karena terkadang

manusia rela untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum karena dorongan faktor ekonomi. Untuk itu, hal-hal tersebut di atas baru bisa berjalan seperti yang diharapkan apabila dibarengi dengan tindakan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan kesejahteraan sosial bagi masyrakat sekitar lokasi kebakaran hutan atau sumber asap. Kalau kita lihat dari perspektif Maslow dalam bukunya Motivation and Personality (1970), manusia karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar/sehari-hari rela untuk melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan perkebunan karena mengharapkan imbalan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selanjutnya, apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi maka akan ada perasaan memiliki dan tumbuh perasaan kasih sayang. Hal ini dapat diterapkan dalam hal pembakaran lahan ini. Apabila masyarakat setempat telah dipenuhi kebutuhan dasarnya. maka mereka akan timbul kebutuhan lain yaitu kebutuhan akan kenyaman dalam hidup termasuk kenyaman di dalamnya keindahan alam/lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal.

5.kesimpulan

Dari uraian di atas nampak bahwa pembakaran semak belukar hutan di Indonesia untuk membersihkan lahan sudah menjadi bagian dari pada salah satu proses pembukaan lahan yang merupakan suber terjadinya bencana asap. Hal inl diperparah dengan pembakaran yang dilakukan pemilik perkebunan Untuk perbersihan lahan perkebunan.

Asap berdampak pada lingkungan dalam hal ini kesehatan manusia. ekonomi dan juga hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Nampak jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup gagal total memerangi kebakaran hutan yang menimbulkan asap terjadi setiap tahun. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup menjadi korban asap tersebut. Untuk itu dipedukan suatu lembaga/institusi/task force yang bertanggung jawab langsung kepada presiden atau lembaga superbody untuk memerangi asap. Di samping itu diperlukan aturan yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai. tenaga ahli dalam bidang ini, peningkatan kesejahteraan aparat yang terlibat maupun penduduk yang mendiami lokasi sumber asap, usaha yang keras dan terpadu baik dari pihak pemerintah, masyarakat setempat dan pengusaha dan pemilik perkebunan daiam rangka memerangi asap.

Daftar putaka

[1] Antara, Oktober2005, http://www.antara.co.id

[2] Gatra 12 Oktober 2006, http://www.gatra.com

[3] Gatra 14 Oktober, 2006, http://www.gatra.com

[4] Gatra 16 Oktober, 2006, http://www.gatra.com

[5] Gatra 18 Oktober, 2006, http://www.gatra.com

[6] Harian Kompas 8 September, 2006, http://www.kompas.com

[7] Harian Kompas 5 Oktober, 2006, http://www.kompas.com

[8] Harian Kompas 8 Oktober, 2006, http://www.kompas.com

[9] Harian Kompas 19 Oktober, 2006, http://www.kompas.com

[10] Houghton, J. (1997) Global Warming.England: Cambridge University Press.

[11] Maslow, Abraham (1970) Motivation and Personality, New York: Harper & Row.

[12] Pg. D.P. Hj. Mustapha, Ak. Shamhary, "The 1997 Haze Episode Affecting Brunei Darussalam," Environment Unit, Ministry of Development, Brunei Darussalam

[13] Republika 29 Agustus, 2006, http://www.republika.co.id

[14] Sriwijaya Pos, 6 Nopember 2006, www.indonesia.com/sripo/

31. Dampak Asap dan Penanggulangannya

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		